

**RECALL PARTISIPATIF**  
**(Paradigma Asas Musyawarah Mufakat dalam Mekanisme Pemberhentian**  
**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)**

Iswatul Hasanah, Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.,  
Tunggul Anshari S.N., S.H., M.H.  
iis.iswatulhasanah@gmail.com

***Abstract***

*The Recall rights in Indonesia is fully given to political parties (Article 213 of Law No. 27 of 2009 on the MPR, DPR, DPD and DPRD and Article 12 letter h Law No. 2 of 2008 on Political Parties). There are several things that need to be reviewed in granting the right of recall to political parties: 1) there are no clear parameters (reasons and interests) implementation of the recall; 2) the mechanism of recall by the political party system paradigm indicates inconsistency with the sovereignty of the people that built through general elections; 3) granting the right of recall to a political party is not the principle of rule of law; 4) there is a judicial review about recall as evidence of disagreement with the recall provisions in Indonesia; 5) recall by political parties on the potential of tyranny and limiting functions of Parliament.*

*Indonesia is not the state that has sovereignty from the people, but also embrace the democratic party in constitutional practice. Related with recall wholly given to political parties, based on the theory, the reality of law, and the state of society in Indonesia, it is not wise to erase the right of recall on political parties, but also be very discriminating when it does not involve the people in a term to control mechanism. Thus, the determination of holding such rights issues can be resolved if there is harmonization between them through participatory recall. Participatory recall an idea over legal issues with using a pre-election strategy, performance monitoring strategy, and the strategy of repressive measures, to monitoring members of the House of Representatives since general elections until the start of the performance period. This process will promote the use of the principle of consensus agreement.*

*Keywords: Removal the Member of DPR RI, Recall Participative, The Principle of Consensus Agreement*

**Ringkasan**

Hak *recall* di Indonesia sepenuhnya diberikan kepada partai politik (Pasal 213 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 12 huruf h UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau dalam pemberian hak *recall* kepada partai politik: 1) tidak ada parameter yang jelas (alasan dan kepentingan) dilaksanakannya *recall*; 2) mekanisme *recall* oleh partai politik menandakan inkonsistensi dengan paradigma sistem kedaulatan rakyat yang dibangun melalui pemilu; 3) pemberian hak *recall* kepada partai politik tidak mengedepankan prinsip *rule of law*; 4) terdapat *judicial review* tentang *recall* sebagai bukti ketidaksepakatan dengan

ketentuan *recall* di Indonesia; 5) *recall* oleh partai politik berpotensi pada kesewenang-wenangan dan membatasi fungsi DPR RI.

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, akan tetapi juga menganut demokrasi kepartaian dalam praktik ketatanegaraan. Terkait dengan *recall* yang sepenuhnya diberikan kepada partai politik, berdasarkan teori, kenyataan hukum, dan keadaan masyarakat di Indonesia, tidaklah bijak apabila menghapus hak *recall* pada partai politik, akan tetapi juga akan sangat diskriminatif apabila tidak melibatkan rakyat dalam mekanisme kontrol tersebut. Sehingga, dilematika penetapan pemegangan hak tersebut dapat teratasi apabila terdapat harmonisasi diantara kesuanya melalui *recall* partisipatif. *Recall* partisipatif merupakan gagasan atas isu hukum dengan menggunakan strategi pra-pemilihan umum, strategi pengawasan kinerja, dan strategi tindakan represif, untuk mengawasi anggota DPR RI mulai dari pencalonan sampai pada masa kinerja. Proses ini akan mengedepankan penggunaan asas musyawarah mufakat.

Kata kunci: Pemberhentian Anggota DPR RI, *Recall* Partisipatif, Asas Musyawarah Mufakat

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Salah satu konsekuensi atas pilihan sebagai negara hukum yakni setiap tindakan baik penguasa maupun rakyat harus dibenarkan oleh hukum, artinya suatu tindakan akan memenuhi peraturan hukum apabila diatur dalam peraturan atau tindakan tersebut tidak dapat dilakukan karena dilarang oleh peraturan. Prinsip negara hukum erat kaitannya dengan prinsip demokrasi karena kedua prinsip tersebut seperti dua sisi dari satu mata uang yang berjalan secara beriringan, yang selanjutnya disebut sebagai negara hukum demokratis. Hukum dibangun dan ditegakan dengan prinsip demokrasi, serta dilarang untuk dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegaskan dengan kekuasaan semata (*machsstaat*). Sama halnya dengan demokrasi yang memerlukan instrumen hukum untuk mencegah terjadinya mobrokrasi.

Demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat/ kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat memiliki wewenang/ kedaulatan untuk memerintah. Di Indonesia, semangat melibatkan rakyat dalam proses pemerintahan tercermin dalam ideologi bangsa yakni Pancasila. Para pendiri negara menjelaskan bahwasannya sila ke-5 Pancasila (keadilan sosial) merupakan filsafat politik Indonesia dalam semangat pembangunan dan penguatan demokratisasi. Penguatan demokratisasi tersebut lebih berarah pada memposisikan masyarakat sebagai teman pembangunan, bukan hanya sebagai obyek atas strategi dan kebijakan. Masyarakat berdaulat/ berkuasa dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan bertujuan untuk menjamin nilai

keadilan yang hidup ditengah masyarakat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

Sudut perwakilan muncul pada negara demokrasi yang menggunakan sistem pemerintahan berkedaulatan rakyat. Pembukaan UUD 1945 dan sila ke-4 Pancasila menjelaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang menganut prinsip permusyawaratan/ perwakilan. Artinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan melalui lembaga perwakilan rakyat yang mampu mengejawentahkan nilai demokrasi, menyerap, serta memperjuangkan aspirasi rakyat, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu lembaga perwakilan rakyat di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (Pasal 20 A UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Fungsi tersebut harus dijalankan dalam kerangka representasi rakyat (Pasal 69 ayat (2) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Selain itu fungsi DPR RI diperkuat dengan adanya praktik sistem pembagian kekuasaan lembaga negara dengan prinsip *check and balances*, dalam pelaksanaan tugas ketatanegaraan. Prinsip *check and balances* merupakan prinsip tidak adanya lembaga pemerintahan/ lembaga negara yang *supreme*. Sesuai dengan prinsip tersebut, DPR RI dalam hal ini bertindak dalam wilayah kekuasaan legislatif serta menjadi penyeimbang dalam kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan yudikatif.

Kehadiran DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat, pada praktiknya memiliki permasalahan. *Pertama*, krisis kepercayaan masyarakat terhadap

anggota yang telah dipilihnya. *Kedua*, kinerja anggota yang dinilai mayoritas buruk. Oleh karenanya, perlu adanya mekanisme kontrol. Pemerintah dalam hal ini telah mempersiapkan mekanisme kontrol yakni melalui upata pemberhentian antar waktu (Pasal 213-216 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan pergantian antar waktu (Pasal 217-218 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Pemberhentian dan pergantian antar waktu tersebut disebut sebagai *recall*.

Hak *recall* di Indonesia sepenuhnya diberikan kepada partai politik (Pasal 213 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 12 huruf h UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau dalam pemberian hak *recall* kepada partai politik: 1) tidak ada parameter yang jelas (alasan dan kepentingan) dilaksanakannya *recall*; 2) mekanisme *recall* oleh partai politik menandakan inkonsistensi dengan paradigma sistem kedaulatan rakyat yang dibangun melalui pemilu; 3) pemberian hak *recall* kepada partai politik tidak mengedepankan proses penegakan hukum; 4) terdapat *judicial review* tentang *recall* sebagai bukti ketidaksepakatan dengan ketentuan *recall* di Indonesia; 5) *recall* oleh partai politik berpotensi pada kesewenang-wenangan dan membatasi fungsi DPR RI.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Apa landasan pemikiran pemberian hak *recall* pada warga negara?
- b. Bagaimana gagasan mekanisme *Recall* Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Pemikiran Pemberian Hak *Recall* Pada Warga Negara**

Ada beberapa hal yang perlu ditinjau dalam *Recall* oleh Partai Politik, terhadap ketidaksesuaian penerapannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Diantaranya adalah *Pertama*, tidak ada parameter yang jelas terkait dengan *recall* oleh partai politik. *Kedua*, mekanisme *recall* oleh partai politik menandakan inkonsistensi paradigma sistem kedaulatan rakyat yang dibangun melalui pemilu. *Ketiga*, pemberian hak *recall* kepada partai politik tidak mengedepankan prinsip *rule of law*. *Keempat*, terdapat *judicial review* tentang *recall* sebagai bukti ketidaksepakatan dengan ketentuan *recall* di Indonesia. *Kelima*, *Recall* oleh Partai Politik berpotensi pada kesewenangan dan membatasi fungsi DPR RI. Praktik pelaksanaan *recall* di Indonesia belum melibatkan rakyat. Pada prespektif filosofis dan yuridis, rakyat harus terlibat dalam proses *recall* sebagai mekanisme pengawasan kinerja pemerintah, khususnya anggota DPR RI.

#### **a. Landasan filosofis**

Pada sila ke-4 Pancasila, tersirat makna demokrasi perwakilan, akan tetapi terdapat 3 ciri krusial yang melekat didalamnya: kedaulatan rakyat, permusyawaratan, dan dilaksanakan dengan hikmat-kebijaksanaan. Hal ini yang menjadi landasan pokok bahwasannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, hendaknya menghormati suara rakyat dalam politik. Rakyat dalam kerangka permusyawaratan (kekeluargaan) menegaskan persatuan serta memiliki peran dan pengaruh besar pada rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat harus berlandaskan pada hikmat-kebijaksanaan dengan

mengamalkan nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Hal ini juga diperkuat dengan frasa kedaulatan rakyat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”, dan diperjelas dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Ketidakterlibatan rakyat dalam proses demokrasi akan menyalahi nilai yang terkandung dalam sila ke-2 Pancasila, larangan praktik diskriminasi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Hal ini bermakna bahwasannya diskriminasi dalam bentuk apapun dilarang dalam paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam hal ini hak *merecall*. Ketika hak *recall* di berikan kepada partai politik sebagai pengusung dalam pemilu, hak *recall* seharusnya juga diberikan kepada rakyat yang berposisi pemilih dalam pemilu. Proses inilah yang tidak akan menyalahi nilai sila ke-2 Pancasila/ tidak ada diskriminasi dalam pemberian hak.

#### b. Landasan yuridis

##### 1. Posisi rakyat juga diperkuat dengan kedudukannya sebagai pemilih.

Memilih merupakan suatu hak berpolitik, adapun secara yuridis dalam:

- Hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, Pasal 28C ayat

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dalam hal ini memilih pemimpin merupakan salah satu upaya untuk membangun bangsa

dan negara, dan secara konstitusional dilindungi oleh undang-undang dasar.

- Hak untuk memilih dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 43 ayat (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang

Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*

(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

## 2. Larangan praktik diskriminasi

- Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Diskriminasi adalah:

setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial,



status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

- Secara konstitusional larangan praktik diskriminasi tercantum dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pada kaitannya terhadap alasan untuk *merecall*, tidak ada suatu patokan maupun aturan khusus yang membahas di dalamnya. Pada praktik ketatanegaraan di Indonesia dalam prespektif yuridis dan implementatif, tidak ada satupun alasan untuk *merecall* anggota DPR RI. Bahkan dalam aturan AD-ART partai politik, tidak satupun yang menyebutkan adanya alasan untuk *merecall* pada konteks *recall* yang diusulkan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR RI. Apabila anggota DPR RI tersebut melanggar AD ART partai politik yang mengusungnya, sanksinya adalah pemberhentian dari anggota partai politik tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

#### Pasal 2

(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. asas dan ciri Partai Politik;
- b. visi dan misi Partai Politik;
- c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
- d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
- e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
- f. kepengurusan Partai Politik;

- g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
- h. sistem kaderisasi;
  - a. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
  - b. peraturan dan keputusan Partai Politik;
  - c. pendidikan politik;
  - d. keuangan Partai Politik; dan
  - e. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

Pasal 16

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d. melanggar AD dan ART.

**2. Gagasan Mekanisme *Recall* Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)**

Berdasarkan teori, kenyataan hukum, dan keadaan masyarakat sekarang, tidaklah bijak jika mengambil jalan untuk menghapus hak *recall* pada partai politik, dan akan menyalahi prosedur demokrasi serta melanggar hak asasi rakyat untuk terlibat dalam kekuasaan pemerintah seandainya pada konteks ini rakyat tidak diberi hak untuk *merecall*. Dilematika dua jalan penetapan pemegang hak ini dapat teratasi apabila terdapat harmonisasi diantara keduanya melalui *Recall* partisipatif.

*Recall* partisipatif merupakan gagasan atas isu hukum tentang penetapan pemegang hak *recall* di Indonesia yang menganut sistem demokrasi kepartaian dan kedaulatan rakyat. Subyek pada *recall* partisipatif adalah rakyat dan partai

politik, sedangkan obyeknya adalah anggota DPR RI. Terdapat beberapa strategi dalam penerapan *recall* partisipatif ini.

#### 1. Strategi Pra-Pemilihan Umum

Strategi pra-pemilihan umum ini terkait dengan interaksi sosial antara calon anggota DPR RI dengan masyarakat. Maksud dari interaksi sosial disini adalah komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan calon anggota DPR RI untuk mempengaruhi masyarakat dalam kepentingan proses pemilihan anggota legislatif.

Interaksi sosial antara calon anggota DPR RI dengan masyarakat terjadi pada masa kampanye. Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwasannya Kampanye Pemilu merupakan kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Strategi penerapan *recall* partisipatif pada tahapan strategi pra-pemilihan umum dilakukan melalui penguatan visi dan misi calon anggota DPR RI pada masa kampanye yang dilaksanakan oleh pihak-pihak (stakeholder) yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif. Adapun strateginya adalah sebagai berikut:

- a. Partai politik yang ingin menjadi peserta dalam pemilihan umum, terlebih dahulu mengikuti verifikasi persyaratan partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

- b. KPU harus memasukkan adanya visi dan misi Partai Politik tentang Program Kerja Periode 5 Tahun setelah pemilihan umum menjadi salah satu persyaratan dalam verifikasi peserta pemilihan umum DPR dan DPRD.
- c. Proses selanjutnya adalah Pengumuman Partai Politik yang menjadi peserta pemilihan umum, setelah melengkapi semua persyaratan termasuk visi dan misi Partai Politik.
- d. Partai politik yang telah menjadi peserta pemilu, mengajukan calon anggota DPR RI yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. KPU harus memasukkan adanya visi dan misi calon anggota DPR RI tentang Program Kerja selama 1 Periode Kepemimpinan/ 5 tahun setelah pemilihan umum, menjadi salah satu persyaratan dalam verifikasi calon anggota DPR RI dalam pemilihan umum DPR dan DPRD.
- f. KPU membuat visi dan misi calon anggota DPR RI tersebut dalam bentuk Kotrak Politik secara tertulis.
- g. Kotrak Politik dibacakan dan ditandatangani di depan perwakilan masyarakat yang telah ditunjuk oleh KPU. Perwakilan masyarakat ini

## 2. Strategi Pengawasan Kinerja

Strategi pengawasan kinerja ini terkait dengan pemantauan kinerja anggota DPR RI yang telah terpilih dalam kurun waktu tertentu. Maksud dari strategi pengawasan kinerja disini adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat, pada masa kinerja anggota DPR RI tersebut, dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi dan memastikan realisasi dari visi dan misi yang telah diusung anggota DPR RI pada masa pencalonan di pemilihan umum.

Kurun waktu tertentu yang di maksudkan disini adalah 2 (dua) tahun setelah sumpah jabatan. Masa 2 tahun merupakan masa menuju setengah periode kepemimpinan, yang mana ini adalah masa untuk melakukan pembuktian apakah anggota DPR bersungguh-sungguh/ beriktikad baik dalam melaksanakan visi dan misinya atau tidak.

Strategi penerapan *recall* partisipatif pada tahapan strategi pengawasan kinerja ini dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat, dan pihak-pihak (stakeholder) yang terkait. Pihak (stakeholder) yang terkait disini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang khusus bergerak dalam pengawasan kinerja anggota DPR RI. Misalnya, Forum Perduli Parlemen Indonesia.

### 3. Strategi Tindakan Represif (Persidangan Putusan *Recall*)

Strategi Tindakan Represif ini terkait dengan tindakan tidak telaksanakannya visi dan misi dalam kurun waktu yang telah diperjanjikan, serta terkait dengan persidangan putusan *recall*/ pemberhentian anggota DPR RI yang telah terpilih. Maksud dari Strategi Tindakan Represif adalah proses pembuktian tidak tercapainya visi dan misi yang telah diperjanjikan anggota DPR RI dalam persidangan.

Strategi penerapan *recall* partisipatif pada tahapan persidangan ini dilakukan oleh badan yang dibentuk dalam internal kelembagaan DPR RI, yakni Badan *Recall* Anggota DPR RI.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Landasan Pemikiran Pemberian Hak *Recall* Pada Warga Negara

Ada beberapa hal yang perlu ditinjau dalam *Recall* oleh Partai Politik, terhadap ketidaksesuaian penerapannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Diantaranya adalah *Pertama*, tidak ada parameter yang jelas terkait dengan *recall* oleh partai politik. *Kedua*, mekanisme *recall* oleh partai politik menandakan inkonsistensi paradigma sistem kedaulatan rakyat yang dibangun melalui pemilu. *Ketiga*, pemberian hak *recall* kepada partai politik tidak mengedepankan prinsip *rule of law*. Kelima, *Recall* oleh Partai Politik berpotensi pada kesewenangan dan membatasi fungsi DPR RI.

Praktik pelaksanaan *recall* di Indonesia belum melibatkan rakyat. Pada perspektif filosofis dan yuridis, rakyat harus terlibat dalam proses *recall* sebagai mekanisme pengawasan kinerja pemerintah, khususnya anggota DPR RI.

- b. Landasan Pemikiran Pemberian Hak *Recall* Pada Warga Negara  
Gagasan Mekanisme *Recall* Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

Terdapat beberapa strategi dalam penerapan *recall* partisipatif ini.

- 1) Strategi Pra-Pemilihan Umum

Strategi pra-pemilihan umum ini terkait dengan interaksi sosial antara calon anggota DPR RI dengan masyarakat.

- 2) Strategi Pengawasan Kinerja

Strategi pengawasan kinerja ini terkait dengan pemantauan kinerja anggota DPR RI yang telah terpilih dalam kurun waktu tertentu.

### 3) Strategi Tindakan Represif (Persidangan Putusan *Recall*)

Strategi Tindakan Represif ini terkait dengan tindakan tidak telaksanakannya visi dan misi dalam kurun waktu yang telah diperjanjikan, serta terkait dengan persidangan putusan *recall*/ pemberhentian anggota DPR RI yang telah terpilih.

## 2. **Saran**

- a. Seyogyanya terdapat penambahan poin ayat 2 Pasal 213 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, “tidak mampu melaksanakan visi dan misi” dalam point penjelasan dari pemberhentian anggota DPR.
- b. Seyogyanya dibentuk badan dalam lembaga perwakilan rakyat dalam internal kelembagaan DPR RI, yakni Badan *Recall* Anggota DPR RI. Hal ini untuk membuktikan dan memutus pemberhentian anggota DPR RI terkait dengan “tidak mampu melaksanakan visi dan misi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Mukthie Fadjar. **Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia**. Setara Press. Malang. 2012
- Achmad Roestandi. **Responsi Filsafat Hukum**. Amirco. Bandung. 1987
- Amiruddin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008
- Anwar C.. **Teori dan Hukum Institusi**. In Trans Publishing. Malang. 2011.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta. 2010
- Dahlan Thaib. **Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi**. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 2000
- F. Budi Hardiman. **Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas**. Kanisius. Yogyakarta. 2009
- Gregorius Sahdan. **Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto**. Pondok Edukasi. Yogyakarta. 2004
- Green Mind Community (Tim Penulis). **Teori dan Politik Hukum Tata Negara**. Total Media. Yogyakarta. 2009
- Hans-Dieter Klingemann, dkk. **Partai, Kebijakan, dan Demokrasi**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2000.
- Haryono. **Arsitektur Demokrasi Indonesia**. Setara Pers. Malang. 2013
- Hendra Nurtjahjo. **Filsafat Demokrasi**. Bumi Askara. Jakarta. 2006
- Hendarmin Ranadireksa. **Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik "Mengapa ada negara yang gagal Melaksanakan Demokrasi"**. Fokusmedia. Bandung. 2007
- Ichlasul Amal. **Teori-teori Mutakhir Partai Politik**. PT Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. 1996
- Ismail Suny. **Pergeseran Kekuasaan Eksekutif**. Aksara Baru. Jakarta. 1977
- Isrok. dkk.. **Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)**. UB Press. Malang. 2012
- Janedjri M. Gaffar. **Demokrasi dan Pemilu di Indonesia**. KoNpress. Jakarta. 2013
- Jazim Hamidi. **Hermeneutika Hukum Sejarah-Filsafat dan Metode Tafsir**. UB Press. Malang. 2011
- Jazim Hamidi. dkk.. **Meneropong Legislasi di Daerah (Kaukus Pemikiran Kelompok Muda yang Termarginalkan)**. Penerbit Universitas Negeri Malang. Malang. 2008



- Jimly Asshiddiqie. **Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945**. FH UII Press. Yogyakarta. 2005
- Jimly Asshiddiqie. **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**. Sinar Grafika. Jakarta. 2012
- Jimly Asshiddiqie. **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Jimly Asshiddiqie. **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II**. Sekertaris Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2006
- Jimly Asshiddiqie. **Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**. Sinar Grafika. Jakarta. 2012
- Johnny Ibrahim. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Bayumedia Publisng. Malang. 2007
- Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. **Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif**. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta. 2011
- M. Djadjono Efriza. **Wakil Rakyat tidak Merakyat “Evaluasi Kinerja Satu Tahun Wakil Rakyat”**. Alfabeta. Bandung. 2011
- Meriam Budiardjo. **Partisipasi dan Partai Politik**. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1988
- Masykuri Abdillah. **Demokrasi di Persimpangan Makna Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1968-1993)**. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. 1999
- Moh. Kusnardi. dkk. **Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945**. PT. Gramedia. Jakarta. 1983
- Moh. Mahfud MD.. **Politik Hukum di Indonesia**. Rajawali Pers. Jakarta. 2009
- Mr. Koentjoro Poerbopranoto. **Sistem Pemerintahan Demokrasi**. PT Eresco Bandung. Bandung. 1987
- Muchammad Ali Safa’at. **Parlemen Bikameral “Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia”**. UB Press. 2010
- Muchsan. **Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia**. Liberty. Yogyakarta. 2007
- Muhammad Tahir Azhari. **Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini**. Kencana. Jakarta. 2010
- Mukti Fajar. dkk.. **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010
- Abdul Aziz Hakim. **Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011
- Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. Kencana. Jakarta. 2007
- R.Otje Salman. **Ikhtisar Filsafat Hukum**. Amirco. Bandung. 1986
- Reza A. A. Wattimena. **Melampaui Negara Hukum Klasik ‘Locke-Rousseau-Habermas’**. Kanisius. Yogyakarta. 2007

- Robert K. Carr. dkk.. *American Democracy in Theory and Practice (National, State, and Local Government)*. Holt Rinehart Winston. New York. 1961
- Soerjono Soekanto. **Penelitian Hukum Normatif**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Sulardi. **Reformasi Hukum Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi**. In-TRANS Publishing. Malang. 2009
- Sulistiyowati Irianto. dkk. (e.d.). **Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi**. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2011
- Victor Nalle. **Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif**. UB Press. Malang. 2010
- Yudi Latif. **Negara Paripurna “Historisitas, Rasionalitas, an Aktualitas Pancasila”**. PT Gramedia. Jakarta. 2011

### **Jurnal**

- Abdil Mughis Mudhoffi. 2004. **Partai Politik dan Pemilih: Antara Komunikasi Politik vs Komoditas Politik**. Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 2 Desember 2004. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Agus Rianto. 2006. **Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006
- Fahrul Muzaqqi. 2010. **Menimbang Gagasan Negara Hukum (Deliberatif) di Indonesia**. Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 5 Oktober 2010. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Jimly Asshiddiqie. 2006. **Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi**. Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4 Desember 2006. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- R. M. Ananda B. Kusuma. 2004. **Sistem Pemerintahan dengan Prinsip “Check and Balances”**. Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 2 Desember 2004. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- R. M. Ananda B. Kusuma. 2006. **Tentang “Recall”**. Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4 Desember 2006. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Suriakusumah Abd. Muthalib. 2004. **Strategi Pembelajaran Konstitusi**. Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 2 Desember 2004. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

### **Majalah dan Koran**

- Janedjri M. Gaffar. **Disenting Opinion Recall**. Majalah Konstitusi: Berita Mahkamah Konstitusi edisi November-Desember. 2006

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis  
Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan  
Daerah. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik  
Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 008/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi  
Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 008/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi  
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009  
Tentang Tata Tertib  
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011  
Tentang Kode Etik  
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011  
Tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan  
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

#### **Internet**

Attorney David C. Grossack. ***RECALLING U.S. SENATORS AND CONGRESSMEN A Legal Analysis Prepared for the U.S. Citizens Association.***

<http://www.uscitizensassociation.com/pdfs/Recalling%20U.S.%20Senators%20and%20Congressmen.pdf>

Caroline Damanik. 2013. **Survei Insis: Publik Makin Tak Puas pada Kinerja DPR.**

<http://nasional.kompas.com/read/2013/09/29/1224051/Survei.Insis.Publik.Makin.Tak.Puas.pada.Kinerja.DPR>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. **KOMISI.**

<http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/komisi>

Gita Farahdina. 2014. **Lebih 250 Anggota DPR Dapat Rapor Merah FORMAPPI.**

<http://news.metrotvnews.com/read/2014/04/03/226188/lebih-250-anggota-dpr-dapat-rapor-merah-formappi>

Inggried Dwi Wedhaswary. **Rapor Merah DPR 2009-2014.**

<http://nasional.kompas.com/read/2014/04/04/0837400/Rapor.Merah.DPR.2009-2014>

Jimly Asshiddiqie. 2007. **Gagasan Negara Hukum Indonesia.**

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)

Jimly Asshiddiqie. 2008. **Prinsip Pokok Negara Hukum.**

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>

Bagir Manan. Perkembangan Undang-Undang 1945. UII Press. Yogyakarta. 2004

- Nike K. Rumokoy. 2012. **Kajian Yuridis Tentang Hak *Recall* Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.** [http://repo.unsrat.ac.id/49/1/Hal\\_1\\_-\\_7\\_Nike\\_K.\\_Rumokoy.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/49/1/Hal_1_-_7_Nike_K._Rumokoy.pdf)
- Silvanus Alvin. 2013. **Rapor Merah Anggota DPR Versi Formappi: 83.8% Kinerjanya Buruk.** <http://news.liputan6.com/read/2031738/rapor-merah-anggota-dpr-versi-formappi-838-kinerjanya-uruk#sthash.Zb4HDdH2.dpuf>
- Sri Sanituti Hariadi. **TUJUAN HUKUM: Bahan Ajar mata Kuliah Pengantar Filsafat Hukum.** [web.unair.ac.id/admin/file/f\\_20025\\_a17.ppt](http://web.unair.ac.id/admin/file/f_20025_a17.ppt)
- Hukum Online. 2007. **Mempertanyakan Hegemoni *Recall* Anggota DPR di Tangan Partai Politik.** [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).